

FOOD AND ABSORPTION CAPABILITIES OF INDUSTRIAL LABOR IN MOROWALI DISTRICT

PANGAN DAN DAYA SERAP TENAGA KERJA INDUSTRIALI DI KABUPATEN MOROWALI

Hadisuddin Bolong^{1*}, Abd Hakim¹, Zaiful¹, Nurfaizila¹

¹Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

* ipulk.kamal@gmail.com

Article Informations

Keywords:

*Industrialization,
Food,
Labor*

ABSTRACT

Industrialization has massively impacted to low level of food availability, also it has triggered labor absorp competition at industrial companies. This study aims to identify condition of the availability of production land and employment opportunities for local communities in industrial areas in Morowali regency, Central Sulawesi. The study outcomes show that agricultural production lands in the border areas to the industrial parks are still available, although it seems not yet fully able to meet the food needs of community due to high demand. The demands of agriculture products especially food needs (vegetable and rice) and also livestock products in this area is too much high both to meet the needs of residents, as well as for companies to meet the consumption needs of their labors, while the local community's lands shifted and are designated for permanent or rented housing due to high demand of housing in this area. Labor opportunities both in agriculture sector and industry have significant increased. The resident's economic income in this area relatively grew up. However, along with the economic growth, social problems often arise, such as drugs and alcohol abuse.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Industrialisasi,
Pangan
Tenaga Kerja

ABSTRAK

Industrialisasi berdampak pada rendahnya ketersediaan pangan serta memicu kompetisi penyerapan tenaga kerja pada perusahaan industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi ketersediaan lahan produksi dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal pada kawasan industri di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan-lahan produksi pertanian di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan industri masih tersedia meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akibat permintaan yang tinggi. Permintaan atas hasil pertanian khususnya kebutuhan pangan (beras dan sayuran) dan juga hasil ternak di wilayah ini sangat tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan warga maupun untuk perusahaan-perusahaan untuk kebutuhan konsumsi pekerjanya sementara lahan masyarakat setempat bergeser dan diperuntukan untuk hunian tetap maupun sewaan karena permintaan atas hunian di daerah ini cukup tinggi. Ketersediaan lapangan kerja baik di sector pertanian terbuka luas dan permintaan pekerja di perusahaan-perusahaan juga meningkat. Pendapatan ekonomi warga di wilayah ini relative tinggi, namun seiring dengan peningkatan ekonomi tersebut masalah social yang kerap muncul seperti penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

Submisi 05/12/2022

Diterima 31/08/2023

Dipublikasikan 03/09/2023

DOI <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.596>

PENDAHULUAN

Kemajuan industri global telah memunculkan bentuk masyarakat baru yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Fadli (2014), transformasi sosial masyarakat tersebut bertumpu pada aliran komoditi dan produksi negara-negara ASEAN

untuk makmur dan kompetitif melalui pemerataan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial ekonomi serta perkembangan industri nasional.

Integrasi ekonomi menjadi semangat MEA memberi peluang di level regional – ketersediaan pasar tenaga kerja sehingga menciptakan pembangunan sekaligus pertumbuhan ekonomi hingga level daerah. Pada konteks ini, menurut D' Ornary (2020) bahwa pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal. Namun mesti disertai upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya.

Adanya perkembangan industri nasional kini memberi dampak besar pada sektor sosial ekonomi masyarakat di suatu kawasan. Faktual, masuknya industri di suatu daerah secara cepat mengubah pola-pola kehidupan masyarakat perdesaan yang bertumpu pada sektor agraris. Industri pula menciptakan urbanisasi yang tiada henti, berikut konsekuensinya pada perubahan sistem matapencaharian masyarakat sehingga mengubah kategori sosial seperti munculnya kelas sosial baru – masyarakat industri dan meningkatnya kebutuhan pangan dikawasan industri.

Saat ini Kabupaten Morowali telah berubah menjadi kawasan industri dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling pesat di Sulawesi Tengah. Data BPS Morowali (2020) menunjukkan tingkat kemiskinan menurun, dari 14,34% tahun 2018 menjadi 13,43% tahun 2020 yang diikuti naiknya PDRB 2,11%. Naiknya pertumbuhan ekonomi dimulai ketika wilayah ini mulai bergantung pada sektor industri nikel – sebut saja keberadaan PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) yang memiliki jumlah tenaga kerja besar. Data HRD IMIP tahun 2021 menunjukkan jumlah tenaga kerja IMIP mencapai 43.635 orang dan dari jumlah tersebut 5.934 diantaranya merupakan tenaga kerja asing.

Kondisi ini bermakna bahwa keberadaan industri besar disuatu kawasan akan memunculkan kebutuhan sosial ekonomi yang besar pula. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan meningkatkan kebutuhan pangan dikawasan industri. Sementara di sisi lain lahan produksi terancam oleh ekspansi industri. Persoalan sosial ekonomi lainnya yaitu kebutuhan tenaga kerja yang besar khususnya peluang kerja masyarakat lokal – yang jika tidak diatur secara proporsional akan memicu konflik laten baik antara sesama pekerja Indonesia maupun dengan pekerja asing.

Jika persoalan tersebut tidak ditangani secara serius dikhawatirkan memunculkan beberapa permasalahan fundamental, seperti: (1) luasnya jangkauan (ekspansi) industri disuatu kawasan, akan semakin memperkecil (mempersempit) lahan produksi penyangga kebutuhan pangan, sehingga semakin sulit ketersediaan kebutuhan pangan; (2) apabila peluang daya serap tenaga kerja masyarakat lokal tidak proporsional akan memunculkan kecemburuan sosial dan kompetisi tidak sehat, sehingga berpotensi konflik sosial.

Pokok-pokok permasalahan ini dapat diatasi apabila: (1) setiap perusahaan membuka ketersediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal secara proporsional sehingga akan memperkecil potensi konflik; dan (2) pemerintah daerah memberi perhatian serius untuk mencegah dan memperbaiki dampak ekspansi industri terhadap kawasan-kawasan pertanian (basis produksi) yang terancam rusak maupun hilang. Ketersediaan pangan dan peluang daya serap tenaga kerja lokal di kawasan industri merupakan dua persoalan yang menarik dibahas dalam tulisan ini. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan ilmiah pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam menyusun kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Masyarakat Industri dan Masyarakat Post Industri

Secara sosiologis, kehadiran masyarakat industri mengacu pada terjadinya revolusi industri di Inggris yang berawal dari penemuan mesin uap. Straubhaar dan LaRose (dalam Ridwan, 2018) mengatakan, umumnya masyarakat industri memiliki, beberapa ciri diantaranya: 1) Meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin, yang terpusat di kota-kota besar; 2) Migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota (urbanisasi); 3) Peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor pabrik; 4) Jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih kompleks; 5) Munculnya surat kabar untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru industri. Media massa mempunyai peranan penting dalam masyarakat industri; 6) Penemuan teknologi baru seperti film, radio, dan televisi sebagai hiburan kaum urban.

Seiring perubahan sosial yang diiringi kemajuan teknologi, terjadi perubahan dari masyarakat industri menuju masyarakat post industri. Setiap tatanan perubahan sosial akan melahirkan pola hubungan baru, adaptasi baru dan karakteristik masyarakat yang khas, yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Secara sosiologis perubahan sosial sejatinya adalah sebuah proses perubahan masyarakat yang terjadi karena dihela oleh berbagai kekuatan, baik modal, resistensi dan gerakan sosial maupun perubahan yang dipicu oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang makin massif (Ridwan, 2018).

Konsep masyarakat informasi, pada awalnya dikembangkan oleh Daniel Bell pada awal tahun 1970-an melalui prediksinya ketika itu tentang masyarakat pasca industri (*post-industrial society*). Perkembangan masyarakat post-industrial, dengan dukungan teknologi dan revolusi informasi menjadikan hubungan antara manusia dan media menjadi kompleks. Daniel Bell (1973), dalam karyanya *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting* membandingkan tentang tiga karakteristik era borjuasi dalam konteks produksi diantaranya *preindustrial society*, *industrial-society*, dan *post-industrial society*. Era *Post Industrial society* ditandai pasca selesainya perang dunia ke II dan bergesernya *mode of production* dari industri pabrik menuju pemrosesan informasi.

Daniel Bell mengemukakan prediksinya tentang kehadiran masyarakat informasi karena adanya kecenderungan data ketika itu yang memperlihatkan perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru di masyarakat. Kecenderungan utama yang mengiringi proses terbentuknya masyarakat pasca industri adalah kemunculan dan pesatnya pertumbuhan berbagai jenis lapangan kerja yang berhubungan dengan informasi, meningkatnya bisnis dan industri dengan produksi, transmisi dan analisis informasi, serta meningkatnya sentralitas peran para teknologi, yaitu para manajer dan profesional terdidik yang memiliki keahlian khusus dalam mengolah dan memanfaatkan informasi untuk keperluan pembuatan keputusan (Ridwan, 2018).

Sementara itu, dalam masyarakat industri, berbagai pekerjaan di pabrik adalah mata pencaharian yang populer di masyarakat, dan bahkan menjadi norma tersendiri karena sebagian besar masyarakat umumnya telah menyadari bahwa mereka tidak mungkin hanya menggantung kehidupannya dari sektor pertanian di tengah munculnya berbagai pabrik dan industri yang makin massif. Dalam masyarakat pasca-industri, pekerjaan yang dominan umumnya adalah pekerjaan di bidang jasa pelayanan, terutama

pekerjaan yang berbasis pada pengolahan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi (Poloma, 2009).

Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pasal 27 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan dalam Deklarasi Roma (1996) mengamanatkan bahwa memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Amanat tersebut mendasari terbitnya UU No. 18/2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran vital bagi kelangsungan berikut kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Rachman dan Ariani (2002) menemukan bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut.. Menurut FAO (1996) salah satu kunci terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh pangan.

Konsep Tenaga Kerja

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja, didalamnya tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau Jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga kerja (*manpower*) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS membagi tenaga kerja (*employed*), yaitu:

- 1) Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;

- 2) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan
- 3) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam perminggu.

Menurut Pasal 1 pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap individu yang dapat atau mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang dan jasa agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dari segi penjenisannya tergolong gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Meminjam istilah Moleong (2000:5) penelitian kualitatif bertolak dari paradigma alamiah. Artinya, penelitian ini mengasumsikan bahwa realitas empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural, saling terkait satu sama lain. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menjelaskan fenomena kondisi dan permasalahan-permasalahan tenaga kerja dikawasan industri (Bungin, 2009). Pendekatan ini mendeskripsikan hasil penelitian baik studi dokumen maupun analisis persepsi subjek penelitian (Creswell, 2014). Karena itu, setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik. Penelitian kualitatif berlatar alamiah dan tidak menggunakan variabel sebagai satuan kajian melainkan pola-pola yang terdapat dalam masyarakat.

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan mengetahui hubungan sebab-akibat. Kajian dalam penelitian kuantitatif ialah variabel. Ada dua jenis Variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. Penggunaan metode kuantitatif didesain sebagai penelitian korelasional dimaksudkan agar dapat menerangkan penelitian yang menyangkut pengujian hipotesis. Menurut Bungin (2004: 4-5) bahwa penelitian semacam ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variable.

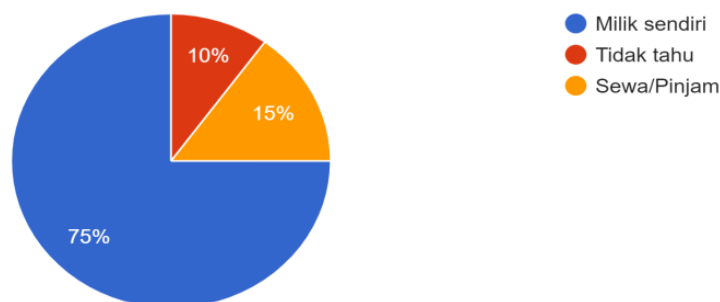
Penggunaan metode kuantitatif - korelasional (*ex post facto*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penataan (pemanfaatan) ruang, maka untuk melihat hubungan variabel tersebut diuji dengan melakukan uji statistik. Namun untuk menjawab masalah keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang dan juga rencana strategi penataan ruang, maka tidak bisa diungkap melalui uji-uji statistik melainkan harus dijelaskan secara alamiah. Dengan demikian, walaupun penelitian didesain sebagai penelitian korelasional kuantitatif, tapi harus dilengkapi dengan pengungkapan realitas kehidupan mereka yang sesungguhnya.

Lokus penelitian di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wilayah industrial yang menyerap tenaga kerja besar. Subjek penelitian dipilih secara Purposive sebanyak 40 orang dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Instrumen penelitian terdiri dari kuisisioner dan pedoman wawancara dengan melibatkan subjek multipihak yaitu dinas/lembaga pemerintah daerah dan kecamatan, pekerja industri (buruh), tokoh masyarakat, dan masyarakat lokal. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan bantuan tabel/grafik sederhana dan dianalisis secara interpretatif.

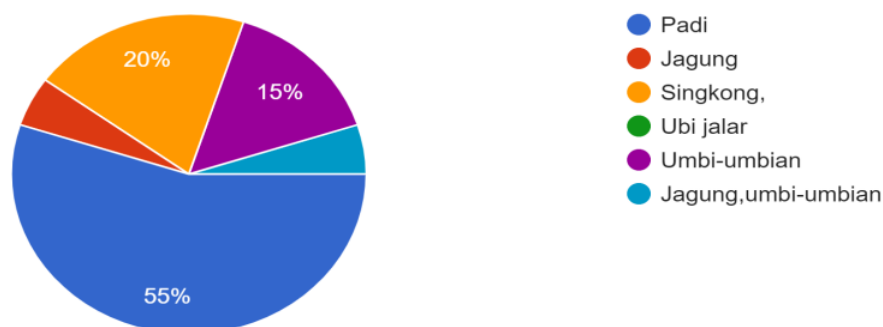
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketersediaan Lahan Produksi Penunjang Kebutuhan Pangan

Ketersediaan lahan produksi merupakan kebutuhan mendasar dalam menunjang kebutuhan pangan masyarakat kawasan industrial. Hasil penelitian dari 40 responden menunjukkan bahwa kondisi dan ketersediaan lahan produksi pangan bagi tenaga kerja industri cenderung bersumber dari lahan produksi milik sendiri seperti pada gambar berikut:



Kepemilikan lahan lahan produksi tidak cukup menunjang kebutuhan pangan, namun kecukupan produksi pangan utama bersumber dari tanaman petani lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padi masih menjadi tanaman utama yang diharapkan menjadi pangan utama yang menunjang kesediaan beras, jagung, umbi dan lainnya bagi masyarakat dikawasan industri. Gambaran mengenai tanaman pangan utama oleh responden (40) diwilayah ini sebagai berikut:



Sekalipun tanaman padi mendominasi, namun secara umum produksi padi di wilayah ini relative belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Luas panen pada tingkat Kabupaten Morowali adalah sebesar 8.494 hektar, dengan produktivitas per-tonnya sebanyak 4,41 ton. Luas panen dan produksi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Morowali tergambar pada table berikut:

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, dan Hasil per Hektar Padi Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali

Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Menui Kepulauan	33	145,58
Bungku Selatan	-	-
Bahodopi	40	176,46
Bungku Pesisir	115	507,31
Bungku Tengah	231	1 019,03
Bungku Timur	268	1 182,26
Bungku Barat	987	4 354,05
Bumi Raya	3 532	15 581,06
Witaponda	3 288	14 504,68
Morowali	8 494	37 470,43

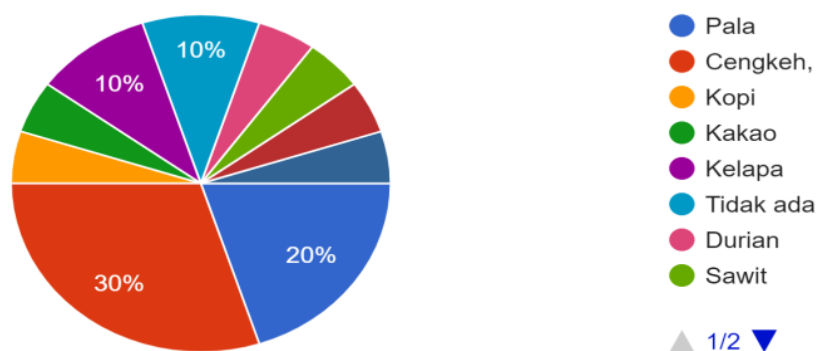
Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa produksi padi rata-rata 4,41 ton/ha jumlah ini menggambarkan bahwa hasil panen/ha belum mencapai angka maksimal. Hasil produksi ideal padi sawah dalam 1 ha sebesar 6-7 ton. Untuk kasus Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong misalnya hasil 1 ha mencapai 5,6 ton (Abay, 2020) di Subang Jawa Barat rata-rata petani hasil produksinya 6,3 ton/ha-nya (Andri, 2020).

Hasil produksi di wilayah Kecamatan Bohodopi dari aspek produktivitas relative masih rendah. Hal ini belum bisa memenuhi kebutuhan warganya. Merujuk kebutuhan beras per orang/tahun. BPS/Kemendag menyatakan bahwa kebutuhan beras per orang sebesar 114 kg per tahun atau 312 gr per hari.

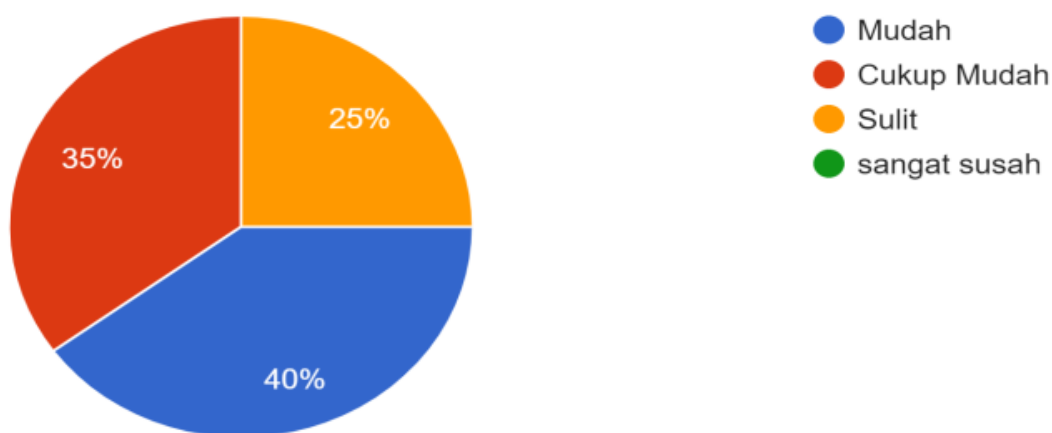
Gambaran perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk di Kecamatan Bohodopi sebanyak 37.322 jiwa maka kebutuhan beras di wilayah ini setahun sebanyak 4,255 ton. Sementara hasil padi yang diproduksi pertahunnya hanya sebesar 146 ton, dengan demikian wilayah ini harus mensuplai kurang lebih 4.109 ton pertahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut didapatkan dari perdagangan antar provinsi. Sebab di kecamatan lain di kabupaten ini tingkat produktivitas beras relative belum bisa memenuhi kebutuhan warganya. Menurut Ibu Arni (47 tahun) saya mengambil beras dari Poso untuk dijual disini dan Alhamdulillah hasil jualan beras lancar.

Tanaman lain yang dianggap mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal bertumpu pada tanaman perkebunan seperti pala, cengkeh, kopi, kakao, kelapa, durian dan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman perkebunan yang paling banyak ditanami masyarakat lokal adalah cengkeh. Cengkeh dianggap memberikan hasil produksi yang besar diikuti oleh tanaman pala. Ini berarti bahwa cengkeh dan pala merupakan tanaman komoditi lokal yang mampu memberikan kontribusi ekonomi lebih baik pada kehidupan masyarakat dikawasan industri.



Begitu pula dengan tanaman hortikultura yang dimiliki masyarakat seperti mangga, durian, kangkung, bayam, semangka, nangka, tomat dan terung, merupakan tanaman yang dianggap paling mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa durian dan kangkung mendominasi diikuti dengan tanaman nangka. Ini berarti bahwa buah dan sayuran menjadi komoditi yang dianggap masyarakat petani sebagai tanaman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kawasan industri.

Produksi masyarakat dibidang pertanian secara ekonomi penting melihat aspek pemasarannya. Persepsi masyarakat terkait kemudahan pemasaran menunjukkan bahwa segala tanaman hasil produksi masyarakat relative mudah dipasarkan. Gambaran persepsi tergambar sebagai berikut:



Hal ini bermakna bahwa prospek usaha pertanian di wilayah ini relative baik untuk dikembangkan lebih maju lagi. Kebanyakan aspek pemasaran dari hasil produksi pertanian masyarakat dijual ke pasar tradisional, namun pangsa pasar untuk menjual ke perusahaan relatif belum terbangun – padahal kebutuhan hasil produksi pertanian sangat dibutuhkan khususnya untuk konsumsi pekerja di perusahaan tersebut. Kecenderungan tempat pemasaran hasil produksi pertanian masyarakat cenderung memilih pasar local atau menjual di lingkungan petani itu sendiri – masih sedikit yang berusaha menghubungkan hasil produksi pertanian dengan menasar pemasaran ke perusahaan.

Tidak hanya di bidang pertanian, Santoso (51 tahun) menurut pengakuannya sejak lama menggeluti usaha pemotongan hewan. Alhamdulillah dek usaha pemotongan hewan

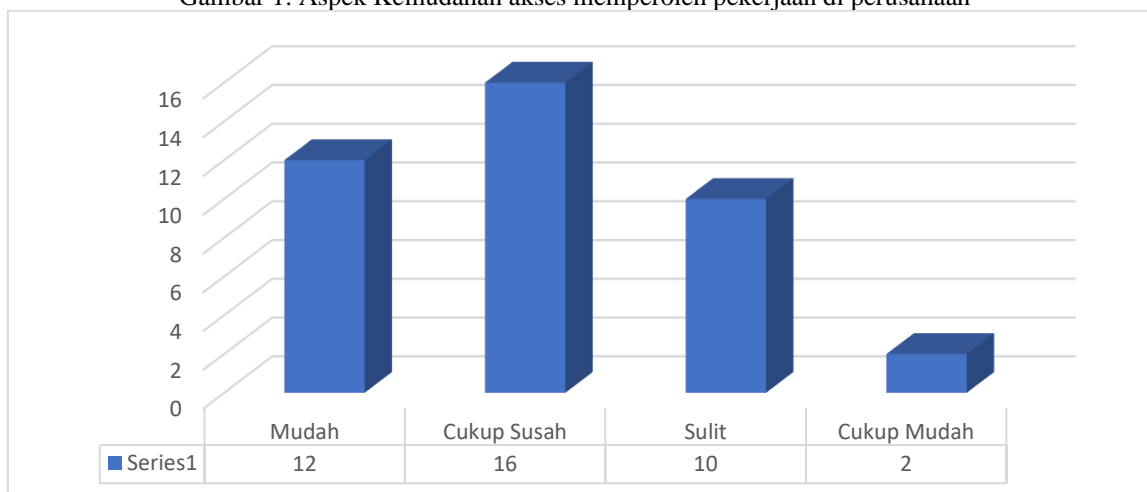
yang saya lakukan lancar, bulan depan saya akan membuka lagi usaha tersebut di Bahodopi. Usaha pertanian dan juga peternakan di wilayah ini relative menguntungkan karena kebutuhan pasar atas pangan relative tinggi.

Namun ketersediaan lahan untuk pertanian mulai menurun. Hasil pengamatan memberi gambaran desa-desa sekitar pabrik Desa Fatufia, Bahodopi dan Desa Keurea banyak terdapat tempat-tempat penyewaan rumah. Lahan-lahan pertanian banyak berubah menjadi rumah-rumah kost untuk pekerja perusahaan. Menurut Nudin (54 tahun) usaha kost lebih menjanjikan karena silih berganti orang menyewanya. Nudin mengungkapkan dari 15 petak tempat kost yang ia punyai penghasilannya 7-10 juta perbulan yang bisa ia dapat.

Ketersediaan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal Dan Potensi Konflik Sosial Kawasan Industri

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah ketenagakerjaan khususnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Tenaga kerja menjadi pangkal utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya daerah industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan kesempatan kerja sektor industri (perusahaan) bagi tenaga kerja lokal masih cukup sulit. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Aspek Kemudahan akses memperoleh pekerjaan di perusahaan



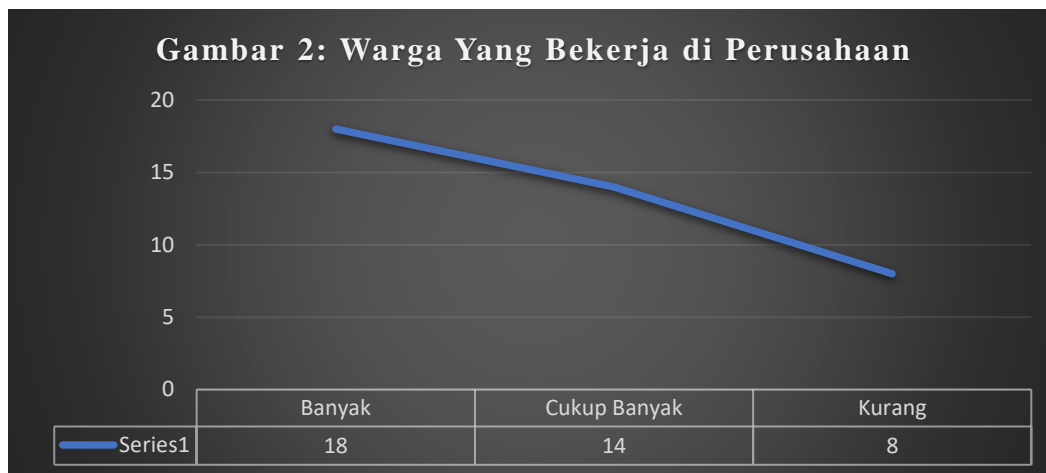
Gambar di atas memberi makna bahwa kesempatan untuk memperoleh akses kerja di sektor industri Morowali masih relatif cukup sulit. Hasil penelitian menemukan pula bahwa meskipun jumlah tenaga kerja dari setiap desa relatif cukup banyak, namun kemudahan untuk memperoleh pekerjaan diperusahaan masih dianggap sulit karena berkaitan dengan sistem administrasi (persyaratan) seperti Salinan ijazah dan KTP.

Di sisi lain, isu kesempatan kerja bagi pekerja lokal dan masyarakat kawasan industri tetap menjadi tantangan utama bagi otoritas lokal. Masalah ketenagakerjaan harus menjadi perhatian serius bersama. Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Tengah melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,77%. Selama periode tersebut, penduduk yang bekerja di sektor informal meningkat 67,37%.

Jika data statistik provinsi menunjukkan kenaikan jumlah tenaga kerja secara total di Sulawesi Tengah, hasil penelitian menunjukkan pula bahwa jumlah tenaga kerja lokal

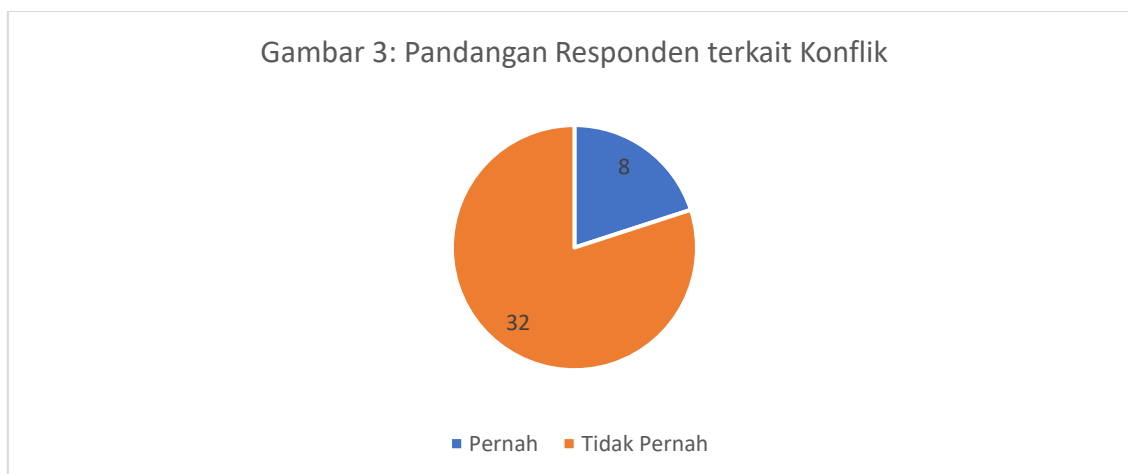
disektor informal (industri) di Kabupaten Morowali banyak yang mendapat kesempatan bekerja diperusahaan.

Jumlah warga desa yang berkerja di Perusahaan menurut pandangan responden sebagai berikut:



Namun banyaknya jumlah tenaga kerja lokal di desa membuat kondisi menjadi tidak seimbang antara kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja desa yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa pekerja di desa umumnya masih banyak yang belum bekerja. Masih banyak tenaga kerja di desa yang belum memperoleh pekerjaan tetap khususnya disektor informal (industri), seperti dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

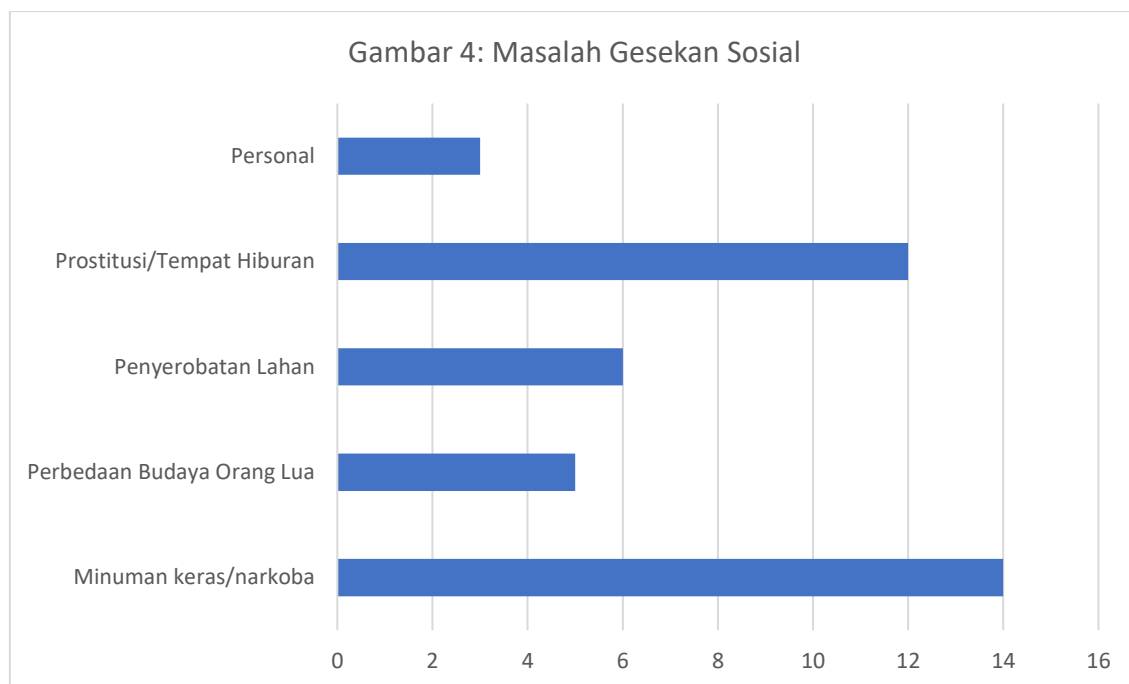
Kondisi wilayah industri yang padat penduduk ini memungkinkan munculnya gesekan sosial yaitu potensi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah sosial khususnya perselisihan/konflik pernah terjadi walaupun belum dalam skala massif.



Gambara konflik dengan demikian relative oleh responden 80 % menyatakan tidak pernah ada konflik. Sebagian lagi menyatakan ada konflik yang disebabkan oleh perselisihan antar individu yang kemudian berkembang menjadi konflik dengan melibatkan kelompok. Selain itu, konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan masih cukup dominan terjadi di Kabupaten Morowali. Hal ini senada yang diungkapkan

AD (pegawai Kecamatan Bahodopi) bahwa konflik social di wilayah ini sangat jarang terjadi. Kalaupun ada konflik tersebut dilatari persoalan selisih paham saja.

Ancaman konflik social realtif kurang, besarnya populasi penduduk dikawasan industri justru menjadi objek pasar obat-obatan terlarang serta narkotika. Meskipun disatu sisi terjadi kemajuan ekonomi, namun disisi lain Kabupaten Morowali telah menjadi objek/pasar transaksi jual beli obat-obatan terlarang dan narkotika, termasuk masalah minuman keras (miras). Gambaran masalah gesekan social lain yag terjadi di wilayah ini sebagai berikut



Selain masalah sosial narkoba dan miras, masalah lainnya seperti kasus-kasus penyerobotan tanah oleh perusahaan maupun ganti rugi lahan yang tidak sepadan turut menjadi masalah fundamental di Kabupaten Morowali. Masuknya penduduk luar juga menimbulkan kecemburuan sosial penduduk lokal terutama dalam konteks kompetisi kesempatan kerja disektor industri/perusahaan. Masyarakat lokal mulai merasakan jika selama ini posisi mereka untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan diakuisisi oleh penduduk luar (pendatang) yang memiliki tingkat pendidikan dan skill yang tinggi dibanding mereka.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi dan ketersediaan lahan produksi yang diharapkan menunjang kebutuhan pangan tenaga kerja industri di Kabupaten Morowali masih cukup luas, namun penting untuk membangun pada tingkat masyarakat suatu kelembagaan ekonomi yang bisa dijadikan alat untuk memaksimalkan usaha pertanian baik pada aspek produksi dan pemasaran hasil produksi ke perusahaan-perusahaan. Begitu pula persoalan ketersediaan dan kesempatan kerja masyarakat lokal relatif belum terpenuhi sebagaimana harapan masyarakat lokal sehingga rentang gesekan sosial dan kompetisi yang akan datang diprediksi berpotensi memunculkan konflik sosial. Disarankan kepada pemerintah untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi masyarakat lokal dan mensinergikan usaha pertanian dan kebutuhan pangan perusahaan-perusahaan

serta diharapkan dapat mengantisipasi masalah-masalah sosial efek industrial maupun potensi konflik sosial berskala besar.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, 2021. *Kabupaten Morowali dalam Angka 2021*, Katalog 1102001.7203
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, 2021. *Kecamatan Bahodopi dalam Angka 2021*, Katalog 1102001.7203030
- Bell, Daniel. 1973, *Industrial Society of The Information Age*, Created May 19, 2004, Up Date April 19,2011
- Bungin Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cresswel, John W. 2014. *Research Disigen: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- D'ornay, Anastasia. 2020. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pergeseran Antar Sektor Ekonomi Di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah*. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) ISSN Online 2623-2472 Vol. 3 No.1 Oktober 2020, hlmn. 10-29
- Fadli, Muhammad. 2014. *Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 Agustus 2014, hlm 281-296.
- Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion*. Jakarta: Buku Obor.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-Cita Politik Islam era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poloma, Margaret M. 2009. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ridwan, Aang. 2018. *Sosiologi Industri Transformasi Menuju Masyarakat Post-Industri*. Bandung: Pustakan Setia Bandung.
- Rachman, Handewi P.S. dan Ariani, Mewa. 2002. *Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran Dan Strategi*. Jurnal FAE. Volume 20 No. 1, Juli 2002 : 12 – 24.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Swasono, Yudo. 1996. *Kebijaksanaan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Warta Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Utomo, Pudjo. 2014. *Kesiapan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Bidang Konstruksi Di Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 7 No. 2 Nov 2014
- Perum Bulog. 2020. “Ketahanan Pangan” diakses dari: <http://www.bulog.co.id> pada 23 Januari 2022
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja
- Undang-undang No. 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan

- Abay, Udin, 2020, *Produktivitas Panen Padi di Sulteng Capai 5,6 Ton/Hektar*, <https://www.swadayaonline.com/artikel/6234>
- Andri, 2020. *Rata-rata Sawah di Subang Hasilkan 6,3 Ton Beras Per Hektare* <https://subang.go.id/berita/rata-rata-sawah-di-subang-hasilkan-63-ton-beras-per-hektare>
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. (2020). Berita Resmi Statistik. Diakses dari: <https://sulteng.bps.go.id/pada> 04 Juni 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali. (2020). Berita Resmi Statistik. Diakses dari: <https://morowalikab.bps.go.id/>